

FAKTOR - FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT GRADUASI SEJAHTERA MANDIRI KELUARGA PENERIMA MANFAAT PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

*Eligibility And Inhibiting Factors Independent Prosperous Graduation
of Family Hope Program Recipients in Central Lampung Regency*

Oleh:

**Lilis Suryati S^{1*}, Kordiyana K Rangga², Yaktiworo Indriyani²,
Wuryaningsih Dwi Sayekti², Yuniar Aviati Syarief²**

^{1*} Program Studi Magister Ilmu Penyuluhan Pembangunan & Pemberdayaan Masyarakat, Universitas Lampung.

² Program Studi Magister Ilmu Penyuluhan Pembangunan & Pemberdayaan Masyarakat, Universitas Lampung.
Jl. Sumantri Brojonegoro 1, Bandar Lampung, 35145, Lampung, Indonesia

*email: mikhaelku@gmail.com

Received: June 17th 2023; Revised : July 19th 2023; Accepted : August 26th 2023

ABSTRAK

Berdasarkan pengamatan tahun 2019 ditemukan bahwa Keluarga Penerima Manfaat PKH yang sudah mampu secara sosial ekonomi, namun tidak bersedia graduasi mandiri, meskipun pendamping sosial PKH sudah melakukan proses edukasi. Keadaan seperti itu sangat membutuhkan penanganan/strategi yang tepat karena bila dibiarkan akan menimbulkan berbagai permasalahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor - faktor pendorong graduasi sejahtera mandiri. Data dikumpulkan bulan September 2022 -- Februari 2023 dengan informan sebanyak 12 pendamping sosial PKH dan 6 KPM PKH di Kabupaten Lampung Tengah. Metode analisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa faktor keberhasilan graduasi sejahtera mandiri di Lampung Tengah yaitu: kompetensi diri Pendamping Sosial PKH, motivasi dan edukasi Koordinator Kabupaten PKH, perilaku keinovatifan SDM dan KPM PKH, apresiasi dari Kemensos RI kepada Pendamping Sosial PKH berprestasi, pola pikir KPM yang visioner, daya Juang yang tinggi dari KPM, kemampuan KPM mengelola keuangan keluarga, kesadaran diri dan rasa malu dalam diri KPM yang mendorong KPM mengajukan graduasi dari PKH, kepekaan sosial dan kepercayaan diri KPM, dukungan dari keluarga KPM, kerajinan KPM menghadiri Pertemuan Peningkatan Keluarga,serta dukungan dari aparatur desa dan kecamatan. Faktor - faktor yang menjadi penghambat graduasi sejahtera mandiri di Kabupaten Lampung Tengah adalah perbedaan persepsi SDM PKH tentang graduasi sejahtera mandiri, rendahnya *self efficacy* sebagian besar pendamping sosial PKH, tidak ada dukungan dari aparatur kampung/kelurahan, standar kriteria keluarga miskin yang digunakan kurang relevan, data graduasi sejahtera mandiri tetap keluar sebagai penerima PKH, dan instrumen resertifikasi tidak diimplementasikan.

Kata kunci: Graduasi, KPM PKH, Mandiri, Pendamping Sosial, Sejahtera

ABSTRACT

Based on observations in 2019, PKH beneficiaries Families were faound who are already socially capable, but are not willing to graduate independently, even though PKH social assistants have already carried out the educational process. Such a situation really needs proper management/strategy because if left unchecked it will cause various problems. This research was conducted in September 2022 - February 2023 with 12 PKH social assistants and 6 PKH KPM

informants in Central Lampung Regency. Methods of data analysis using qualitative analysis. The results of the study stated that factors success of independent prosperous graduation in Central Lampung, namely early competence PKH social assistants, motivation of the PKH District coordinator, behavior innovative human resources and KPM PKH, appreciation from the Indonesian Ministry of Social Affairs to assistants PKH's social achievements, KPM's visionary mindset, high fighting power from KPM, the ability KPM to manage family finances, self awareness and shame within KPM that encourages KPM to apply for graduation from PKH, sensitivity KPM social and self confidence, support from the KPM family, KPM craft attend Family Capacity Building Meetings, support from village officials and subdistrict. Factors that become obstacles to the prosperous graduation is defference in PKH HRD perceptions about graduation prosperous independence, low self efficacy of most PKH social assistants, there is no support from the village apparatus, the standard criteria for poor families the relevant corals are used, the independent prosperous graduation data still comes out as PKH beneficiaries, and recertification instruments are not implemented.

Keywords: *Graduation, Independent, KPM PKH, Social assistant, Prosperous*

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan keadaan seseorang yang mengalami kelemahan dan kesulitan memenuhi kebutuhan dasarnya dan tidak dapat menikmati hidup dengan baik dalam berbagai aspek kehidupan, baik aspek sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan peluang di lapangan kerja guna memperoleh penghasilan yang mencukupi seluruh kebutuhan hidup di daerah tinggalnya (Intan, Rahmawati, dan Wibowo, 2022). Pemerintah Indonesia telah meluncurkan Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun 2007 dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan. PKH merupakan program bantuan bersyarat kepada keluarga miskin yang terdata di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan ditetapkan sebagai peserta atau Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH oleh Kementerian Sosial. Bantuan ini berupa uang non tunai yang diberikan per triwulan. Tujuan PKH adalah untuk memperbaiki kualitas hidup KPM, membantu meringankan biaya pengeluaran KPM, inklusi keuangan, menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian KPM, serta menurunkan angka kemiskinan (Kementerian Sosial RI, 2020). Menurut Data BPS pada September 2021, tercatat sebesar 9,71 persen warga miskin. Terjadi penurunan sebesar 0,43 persen poin terhadap Maret 2021 dan 0,48 persen

terhadap September 2020 (BPS, 2022). Turunnya persentase kemiskinan di Indonesia dikarenakan oleh beberapa penyebab utama, diantaranya adalah program bantuan sosial dari pemerintah yakni PKH yang memiliki dampak positif mengurangi kemiskinan (Kementerian Sosial RI, 2021).

Tahun 2020, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 36,9 triliun untuk 10 juta KPMPKH (Kementerian Sosial RI, 2021). Pemerintah berharap penambahan tersebut akan dapat mempercepat mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia. Pada kenyataannya terdapat keluarga tidak mampu yang sudah lebih 9 (Sembilan) tahun menjadi KPM PKH tetapi belum meningkat keadaan sosial ekonomi keluarganya. Tahun 2020, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 36,9 triliun untuk 10 juta KPMPKH (Kementerian Sosial RI, 2021).

Data yang dipublikasi oleh Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial RI menunjukkan bahwa masih terdapat 177.045 keluarga yang menerima bantuan PKH sejak tahun 2007 - 2019, sedangkan keluarga yang masih menerima bantuan PKH sejak tahun 2008, terdapat 125.802 keluarga (Kusumaningrum, Nugroho, dan Alfrojems (2020). Hal ini menimbulkan pertanyaan mengapa terdapat KPM PKH yang mampu keluar dari kemiskinan dan ada pula yang tidak.

Penambahan bantuan dilakukan dengan tujuan akan mempercepat pengentasan kemiskinan, sehingga diharapkan akan lebih banyak keluarga miskin yang keluar dari kemiskinan. Namun, pada kenyataannya banyak keluarga miskin yang sudah bertahun-tahun mendapatkan bantuan PKH, tetapi belum meningkat keadaan sosial ekonomi keluarganya.

Kabupaten Lampung Tengah memiliki KPM PKH paling banyak di Provinsi Lampung. Tahun 2020, KPM PKH Kabupaten Lampung Tengah berjumlah 71,056 orang dari total 471,431 KPM PKH se-Provinsi Lampung. Berdasarkan pengamatan sejak tahun 2019, ditemukan KPM PKH yang sudah sejahtera namun tidak bersedia keluar dari PKH, meskipun pendamping sosial PKH sudah melakukan proses edukasi. Persepsi KPM yang selalu berpikir bahwa bantuan sosial merupakan bantuan pemerintah yang tidak boleh disia-siakan turut menyuburkan mental miskin dan menempatkan mereka pada zona nyaman sebagai KPM PKH. Keadaan seperti itu sangat membutuhkan penanganan yang tepat karena bila dibiarkan akan menimbulkan berbagai permasalahan. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti mengenai faktor-faktor yang mendorong keberhasilan graduasi sejahtera mandiri di Kabupaten Lampung Tengah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Menurut Bogdan dan Biklen dalam Moleong (2006), analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan memilah-milah menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesis, mendapatkan pola, menemukan inti sari dan menentukan hal-hal yang akan disampaikan kepada orang lain.

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Lampung Tengah. Pemilihan

lokasi penelitian ini dilakukan secara sengaja (*purposive*) dengan pertimbangan Kabupaten Lampung Tengah merupakan daerah yang memiliki jumlah KPM PKH terbanyak di Provinsi Lampung. Informan yang terlibat dalam penelitian ini berjumlah 18 orang. Pengumpulan data untuk wawancara mendalam dan observasi dilakukan pada Bulan September 2022 - Februari 2023 di Kabupaten Lampung Tengah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Informan

Tingkat pendidikan

Pada dasarnya seseorang yang mempunyai pendidikan lebih tinggi, baik formal maupun informal akan mempunyai wawasan yang lebih luas dalam memahami pentingnya produktivitas. Tingkat pendidikan informan dari pendamping PKH adalah sarjana, sedangkan tingkat pendidikan informan dari KPM PKH graduasi sejahtera mandiri bervariasi, SD, SMP dan SMA dengan tingkat pendidikan dominan SMP.

Umur informan

Umur merupakan rentang waktu yang menjadi parameter keberadaan makhluk hidup atau suatu benda. Umur menjadi salah satu faktor yang memiliki kaitan dengan tingkat produktivitas seseorang (Aprilina, Nurmayasari dan Rangga, 2017).

Menurut BPS dan catatan sipil umur diklasifikasikan menjadi umur muda (0-14 tahun), umur produktif (15-64 tahun), dan umur tua (> 64 tahun). Dari 18 informan penelitian ini, hanya satu informan yang berumur tua, sedangkan 17 informan lainnya berumur produktif.

Lama kerja

Pengalaman seseorang menguasai pekerjaannya dapat diketahui dari lamanya bekerja. Menurut Handoko (2007) lama kerja dikategorikan menjadi lama kerja

kategori baru yakni kurang dari 3 tahun, dan kategori lama, yakni lebih dari 3 tahun. Seluruh Informan penelitian ini sudah bekerja sebagai pendamping sosial PKH sejak tahun 2011, 2014, 2016 dan 2018.

Faktor-Faktor Pendorong Graduasi Sejahtera Mandiri KPM PKH

Peneliti telah melakukan wawancara dengan informan yang menjadi sumber informasi untuk mengidentifikasi faktor - faktor pendorong keberhasilan graduasi sejahtera mandiri sehingga peneliti dapat menyajikan data - data mengenai faktor - faktor yang dapat meningkatkan graduasi sejahtera mandiri KPM PKH Kabupaten Lampung Tengah. Berikut merupakan faktor pendorong pelaksanaan graduasi sejahtera mandiri KPM PKH di Kabupaten Lampung tengah.

Pola Pikir KPM PKH

Pola pikir merupakan pemahaman individu yang dapat mempengaruhi tindakannya termasuk dalam menentukan keputusan.. Hasil wawancara peneliti dengan informan pendamping sosial PKH diketahui bahwa pada umumnya KPM yang graduasi sejahtera mandiri mempunyai pola pikir visioner. Keluarga Penerima Manfaat PKH tidak ingin terus hidup dalam kekurangan sehingga berpikir untuk meningkatkan penghasilan keluarga sehingga tercukupi kebutuhan keluarganya..

“HRD (42 tahun)...Hampir semua KPM dampingan Saya yang graduasi sejahtera mandiri punya pola Pikir maju untuk perbaikan keadaan ekonomi mereka”.

Informan HRD menyatakan bahwa seluruh KPM graduasi sejahtera mandiri dampingannya ingin menciptakan perubahan agar mempunyai kehidupan yang lebih baik. Keluarga Penerima Manfaat PKH memiliki keinginan atau kesadaran untuk berubah dan mampu menghadapi kendala - kendala yang muncul dalam upaya perubahan tersebut. Suharto (2006)

mengatakan bahwa indikator keberdayaan seseorang mencakup kemampuan berubah ke arah yang lebih baik, kemampuan menghadapi hambatan - hambatan, kemampuan mendapatkan akses sebagai upaya meningkatkan kapasitas diri, dan kemampuan menjalin relasi dengan orang lain. Hasil penelitian Kusumaningrum, Nugroho dan Alfrojems (2020) mengatakan bahwa faktor utama keberhasilan graduasi mandiri adalah pola pikir dan kemampuan KPM mengelola keuangan.

Kesadaran Diri dan Rasa Malu KPM PKH

Hasil wawancara peneliti dengan informan KPM mengungkapkan bahwa setelah KPM menyadari ada peningkatan taraf hidup pada keluarganya, muncul rasa malu dalam diri KPM kepada masyarakat terutama kepada keluarga miskin yang tidak menerima bantuan sosial. KPM membandingkan dirinya dengan orang - orang di sekeliling mereka yang keadaannya sulit dan miskin tetapi tidak mendapatkan bantuan PKH. Hal tersebut terbukti dapat memotivasi mereka untuk graduasi dari PKH. Berikut hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan KPM.

“NI (36 tahun)...Saya mengundurkan diri karena saya merasa sudah lebih baik dari 2018 kemarin...mungkin ada keluarga ada yang lebih lebih pantas lagi untuk mendapatkan PKH, makanya saya mengundurkan diri dari PKH”

Dukungan dari Keluarga KPM PKH

Menurut hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan 6 (enam) informan KPM diperoleh informasi bahwa semua KPM PKH yang graduasi mandiri karena sudah sejahtera mendapatkan dukungan dari suami/isterinya. Berikut ini adalah hasil wawancara peneliti dengan Informan MU.

“MU (43 tahun)...*sebelum ngomong ke pendamping PKH, saya diskusi dulu dengan suami mau berhenti dari PKH karena memang penghasilan keluarga sudah lebih dari cukup, dan suami mendukung keputusan saya keluar dari PKH*”.

Informan MU mengutarakan bahwa suaminya mendukung keputusannya untuk graduasi dari PKH karena melihat penghasilan keluarga mengalami peningkatan dibandingkan saat awal menjadi penerima PKH.

Hal ini senada dengan penelitian terdahulu yang dikemukakan oleh Armalid, Purboningsih, Widiastuti dan Ninin (2020) bahwa kesadaran diri, rasa malu, kepercayaan dan dorongan memiliki usaha yang maju menjadi faktor internal yang mendorong KPM PKH mengajukan graduasi mandiri, sedangkan dukungan dari pendamping PKH dan keluarga menjadi faktor eksternal yang mempengaruhi KPM PKH graduasi mandiri.

Rutin Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2)

Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2)/*Family Development session* (FDS) merupakan proses pembelajaran terstruktur yang bertujuan untuk mempercepat perubahan pola pikir dan perilaku KPM. Materi - materi yang disampaikan dalam P2K2 memberikan wawasan kepada penerima PKH supaya lebih mengerti pentingnya pendidikan anak, pentingnya kesehatan keluarga, pentingnya mengatur keuangan keluarga, peluang membuka usaha, advokasi terhadap anak, cara memperlakukan lansia dan anggota rumah tangga yang menyandang disabilitas, serta pencegahan dan penanganan stunting. Seluruh materi yang diberikan berkaitan erat dengan upaya meningkatkan kualitas hidup KPM, sehingga Pendamping Sosial PKH harus bersungguh - sungguh, bahkan berinovasi dalam melaksanakan P2K2 supaya KPM berubah menjadi lebih baik.

Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan dengan informan pendamping dan informan KPM, didapatkan informasi sebagai berikut seputar kegiatan dan manfaat dari P2K2.

“ADH (45 tahun)...*P2K2 sangat penting sekali karena memberi edukasi tentang pendidikan keuangan, keluarga, anak, kesehatan dan kesejahteraan sosial...perlu ditambah dengan pelatihan - pelatihan yang meningkatkan skill mereka*”.

Menurut informan ADH, keberhasilannya mendorong 125 KPM PKH graduasi mandiri karena ADH rutin melakukan P2K2 setiap bulan sekali di setiap kelompok dampungannya. Hal itu menciptakan terjalinnya komunikasi yang baik dengan KPM PKH sehingga sosialisasi dan edukasi mengenai graduasi mandiri lebih mudah diterima oleh KPM.

Pendampingan yang Dilakukan oleh Pendamping Sosial PKH

Pendamping sosial PKH memiliki peran sebagai fasilitator, edukator, motivator dan advokator bagi KPM PKH. Begitu banyak peran yang harus dijalankan, sehingga seorang pendamping sosial PKH harus memiliki kompetensi. Khoiriyah dan Kunarti (2019) dalam jurnal penelitiannya mengungkapkan bahwa pendamping PKH memegang peranan penting dalam mendorong kemandirian KPM PKH hingga mampu keluar dari PKH. Kapabilitas pendamping sangat dibutuhkan untuk mengantarkan KPM PKH mencapai graduasi sejahtera mandiri. Selain mendampingi proses bisnis PKH yang meliputi verifikasi dan validasi data, mendampingi KPM saat penyaluran, melaksanakan P2K2, serta memutakhirkan data KPM melalui aplikasi yang disediakan, pendamping sosial PKH melakukan inovasi yang dapat mendukung peningkatan taraf hidup KPM PKH dampungannya. Ini sealur dengan pendapat Putri, Gitosaputro dan Syarief (2020) bahwa tingkat motivasi

petani dipengaruhi oleh intensitas pendampingan. Upaya yang dilakukan supaya masyarakat menerima dan menerapkan suatu perubahan adalah dengan pendampingan.

Perilaku Keinovatifan KPM dan Pendamping Sosial PKH

Perilaku keinovatifan merupakan respon individu terhadap hal baru. Perilaku keinovatifan dapat dikelompokkan menjadi 5 (lima) kategori, meliputi: kelompok perintis (*inovator*), kelompok pelopor (*early adopter*), kelompok penganut dini (*early majority*), kelompok penganut lambat (*late majority*) dan kelompok yang tidak bersedia berubah (*laggards*). Dalam proses pemberdayaan kelompok perintis (*inovator*) dan pelopor (*early adopter*) tidak dapat dijadikan panutan karena kelompok ini memiliki status sosial ekonomi dan keberanian lebih tinggi menghadapi resiko. Kelompok penganut dini (*early majority*) menjadi panutan karena relative memiliki karakteristik yang dimiliki sebagian besar anggota masyarakatnya.

Hasil pengamatan peneliti terhadap informan pendamping, terungkap bahwa pendamping sosial PKH yang capaian graduasi sejahtera mandiri KPM PKH dampungannya tinggi, pendamping tersebut inovatif (mudah menerima perubahan) dan aktif melakukan kegiatan - kegiatan sosial dan pemberdayaan KPM.

Peran Koordinator Kabupaten PKH

Koordinator Kabupaten (Korkab) PKH bertugas memastikan proses bisnis PKH berjalan dengan baik, selanjutnya melakukan evaluasi atas kinerja SDM PKH di wilayah kerjanya. Korkab PKH juga harus menyusun rencana kerja yang memberikan dampak positif bagi peningkatan kapasitas SDM PKH dan mendukung tercapainya tujuan PKH, termasuk menyelesaikan graduasi sejahtera mandiri. Berikut ialah hasil wawancara peneliti dengan informan pendamping.

“SK (33 tahun)...*bagi saya, motivasi yang diberikan Korkab saat rapat atau himbauan melalui WAG menumbuhkan semangat dalam diri pendamping PKH untuk melakukan graduasi mandiri*”.

Pernyataan yang sama dikemukakan oleh informan pendamping ADH mengenai peran Korkab PKH dalam pelaksanaan graduasi sejahtera mandiri.

“ADH (45 tahun)...*salah faktor yang pendukung graduasi mandiri adalah motivasi dari Korkab saat Rapat koordinasi bulanan mengenai perlunya kesadaran peserta PKH untuk merasa ingin mandiri dari ketergantungan bansos setelah kurun waktu tertentu memperoleh bansos utamanya PKH*”.

Informan SK dan ADH mengungkapkan bahwa motivasi dan edukasi Korkab PKH mengenai graduasi sejahtera mandiri menumbuhkan semangat dalam diri mereka untuk melakukan serangkaian kegiatan yang tujuan akhirnya menghantarkan KPM graduasi dari PKH karena sudah sejahtera. Pendamping sosial PKH adalah garda terdepan pelaksana PKH yang membutuhkan dukungan dari semua pihak dalam mendorong KPM PKH ke arah graduasi sejahtera mandiri. Koordinator Kabupaten PKH sebagai pengendali berjalannya PKH di kabupaten/kota harus memastikan bisnis PKH berjalan baik, serta tujuan program dapat dicapai. Koordinator Kabupaten PKH seharusnya PKH di wilayah kerjanya supaya dapat menentukan langkah yang tepat dalam memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh pendamping sosial PKH guna menunjang keberhasilan program mengenali potensi setiap pendamping sosial PKH di wilayah kerjanya supaya dapat menentukan langkah yang tepat dalam memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh pendamping sosial PKH guna menunjang keberhasilan program

*Dukungan dari Aparatur Pemerintahan
Desa dan Kecamatan Setempat*

Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti didapatkan informasi bahwa seluruh pendamping mempunyai pendapat yang sama terkait pentingnya dukungan aparatur desa dan kecamatan dalam hal graduasi mandiri KPM PKH. Dukungan dari aparatur desa terutama kepala kampung/lurah menjadi penting dalam pelaksanaan graduasi mandiri karena secara prosedur data KPM PKH yang digraduasi mandiri harus atas sepengetahuan Kepala Kampung/lurah. Proses mengeluarkan data sebagai penerima PKH baru akan diproses oleh Dinas Sosial Kabupaten setempat apabila berkas yang disampaikan oleh Pendamping Sosial PKH ditandatangani oleh kepala kampung/lurah dan camat setempat.

Menurut informan pendamping, adanya apresiasi dari Kemensos RI kepada pendamping sosial PKH berprestasi dapat memotivasi pendamping PKH meningkatkan kinerja.

“RA (40 tahun)...penghargaan dari Kemensos dan Dinas Sosial Kabupaten ke Pendamping PKH bisa jadi penyemangat untuk kami, karena kami merasa adanya kepedulian, dan hasil kerja kami dihargai. Mendorong KPM mau graduasi mandiri itu bukan pekerjaan mudah”.

Setiap individu mempunyai motivasi dalam dirinya. Motivasi merupakan dorongan seseorang untuk bertindak. Juwono dalam Setiawan (2005) membagi motivasi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu motivasi internal yang berasal dari diri sendiri dan motivasi eksternal yang dipengaruhi dari lingkungannya. Hal - hal yang termasuk motivasi eksternal adalah penghasilan, insentif (bonus), dan harapan (keinginan individu memaksimalkan potensi dirinya untuk dapat memenuhi kebutuhannya.

**Faktor - Faktor Penghambat Graduasi
Sejahtera Mandiri**

Menurut hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan informan pendamping, terdapat temuan beberapa faktor yang menghambat graduasi sejahtera mandiri di Kabupaten Lampung Tengah.

*Perbedaan persepsi SDM PKH tentang
Graduasi Sejahtera Mandiri*

Persepsi adalah pengertian individu tentang situasi atau pengalaman. Persepsi dipengaruhi oleh pengalaman, nilai - nilai, kebutuhan individu, stimulus dan tidak objektif (Abdurrahmat, 1988). Idealnya SDM PKH mempunyai persepsi yang sama tentang graduasi sejahtera mandiri, sehingga penerapannya sama di setiap wilayah kerja.

Persepsi seseorang terhadap sesuatu ditunjang oleh tingkat pendidikan formalnya (Musoleha, Hasanuddin, dan Listiani (2014). Hasil penelitian Tanjung, Rangga, Listiana dan Hasanuddin (2023) mengenai persepsi terhadap PPL terhadap program kostratani menyatakan bahwa motivasi, dukungan pemerintah, tingkat pengetahuan dan tingkat pendidikan formal mempunyai kaitan erat dengan persepsi PPL. Idealnya SDM PKH yang memiliki tingkat pendidikan sarjana mempunyai persepsi yang sama tentang graduasi sejahtera mandiri, sehingga penerapannya sama di setiap wilayah kerja.

Menurut hasil observasi dan wawancara yang sudah peneliti lakukan dengan informan pendamping, terdapat SDM PKH yang menganggap graduasi sejahtera mandiri harus dilakukan karena sesuai dengan tujuan PKH, namun sebagian SDM PKH lainnya berpikir Kementerian Sosial RI dapat mengeluarkan KPM dari kepesertaan PKH melalui proses resertifikasi, sehingga mereka menganggap graduasi sejahtera mandiri tidak perlu dilakukan oleh Pendamping Sosial PKH. Perbedaan persepsi ini menyebabkan sebagian pendamping sosial PKH melaksanakan berbagai upaya graduasi mandiri, dan sebagian Pendamping Sosial PKH lainnya tidak melakukan tindakan

apapun sebagai upaya mendorong KPM graduasi dari PKH.

Self Efficacy Sebagian Besar Pendamping Sosial PKH Masih Rendah

Self efficacy adalah keyakinan seseorang akan potensi diri yang dimilikinya dalam menentukan tindakan yang harus diambil untuk menyelesaikan suatu tugas tertentu (Bandura,1997). Seseorang yang memiliki *self efficacy* tinggi akan mempunyai kemampuan mengembangkan minat lebih dalam pada kegiatan di mana mereka aktif berkegiatan, mempunyai komitmen yang lebih kuat terhadap minat dan menganggap tantangan sebagai tugas yang harus dikuasai. *Self efficacy* pendamping sosial PKH memberikan dampak pada kinerja dan keberhasilannya dalam mendorong peningkatan taraf hidup KPM sehingga mampu graduasi sejahtera dari PKH. Berikut ini merupakan hasil wawancara peneliti dengan informan pendamping.

“AN (37 tahun)... *sulit melakukan graduas di tempat saya apalagi KPM gak menghargai Pendamping PKH dan suka ngancam. Saya hanya bilang ke KPM kalau sudah merasa mampu silahkan mundur. Kan malu sudah kaya dapat bansos*“.

Hasil wawancara peneliti dengan AN dapat diketahui bahwa KPM PKH di wilayah kerjanya tidak menghargai pendamping PKH, baik ucapan maupun perilakunya. AN mengambil langkah pasif kepada KPM dampungannya yang sudah mampu tetapi tidak bersedia graduasi karena suami dari KPM tersebut cenderung berperilaku agresif terhadap pendamping PKH, bahkan berani memberikan ancaman secara langsung. AN merasa tidak ada perlindungan hukum bagi pendamping sosial PKH yang melakukan graduasi KPM, sehingga AN melakukan tindakan yang menurutnya aman. Akibatnya, belum ada KPM dampungannya AN yang graduasi sejahtera mandiri dari PKH. Kendala yang

dialami AN juga dirasakan oleh informan RW, tetapi RW memilih cara dengan melakukan koordinasi dengan Babinsa dan Bhabinkamtibmas setempat, selanjutnya *home visit* untuk pendekatan humanis dengan KPM PKH sudah sejahtera yang tidak bersedia graduasi. RW mampu mengatasi hambatan tersebut, dan proses graduasi di wilayah dampungannya terus dilakukannya.

Tidak Ada Dukungan dari Aparatur Kampung/Kelurahan

Dalam menjalankan tugas pendampingan, pendamping sosial PKH berkoordinasi dengan pihak - pihak yang berkaitan dengan PKH, salah satunya dengan pihak kampung/kelurahan tempat bertugas, karena untuk memutakhirkan data KPM PKH juga melibatkan pihak kampung/kelurahan melalui Operator Siks Ng Kampung/kelurahan. Surat pernyataan graduasi mandiri KPM PKH dan berkas data graduasi mandiri juga harus ada persetujuan dari kepala kampung/lurah.

Menurut informasi dari informan pendamping, hal tersebut menyebabkan sebagian kepala kampung/lurah menjadi terlalu intervensi dengan pekerjaan pendamping sosial PKH, bahkan ada yang menolak pelaksanaan graduasi mandiri. Alasan penolakan itu antara lain; (1) masih memiliki hubungan kerabat dengan KPM yang akan digraduasi; (2) KPM merupakan tim suksesnya saat pemilihan kepala kampung; dan (3) tidak menginginkan bantuan PKH warganya hilang, bahkan berharap ada penambahan kuota bagi warganya yang belum menerima bantuan PKH.

Standar Kriteria Keluarga Miskin yang Digunakan Kurang Relevan

Parameter yang digunakan untuk menentukan tingkat kemiskinan penerima PKH adalah Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 262 Tahun 2022, tentang kriteria fakir miskin yang terdiri dari ; (1) tidak memiliki tempat berteduh/tinggal sehari - hari; (2) kepala keluarga tidak

mempunyai pekerjaan; (3) dalam setahun terakhir pernah mempunyai rasa khawatir tidak dapat makan; (4) pengeluaran terbesar digunakan untuk memenuhi kebutuhan makanan; (5) tidak membeli pakaian dalam setahun terakhir; (6) jenis lantai tempat tinggal sebagian besar berasal dari tanah atau plesteran; (7) sebagian besar dinding tempat tinggal berasal dari bambu, kawat, papan kayu, terpal, kardus, tembok tanpa diplester, rumbia atau seng; (8) tempat tinggal yang ditempati tidak memiliki jamban sendiri atau menggunakan jamban komunitas; dan (9) sumber penerangan tempat tinggal berasal dari listrik dengan daya 450 (empat ratus lima puluh) volt ampere atau bukan listrik.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan seluruh informan pendamping, semua mengemukakan bahwa sangat sedikit KPM PKH yang memenuhi kriteria miskin seperti yang tertulis pada Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 262 Tahun 2022. Keadaan ekonomi KPM PKH yang memenuhi kriteria tersebut hanya 20 persen, akan tetapi belum mencapai standar mampu yang ditentukan oleh Kementerian Sosial RI, yaitu penghasilan keluarga di atas UMK dan di atas standar garis kemiskinan masing - masing kabupaten/kota. Pendamping sosial PKH sering menemukan kondisi rumah KPM sudah bagus dan milik sendiri tetapi kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sehari - hari, atau sebaliknya, status tempat tinggal menyewa namun penghasilan di atas UMK dan garis kemiskinan.

Instrumen Resertifikasi Tidak Diimplementasikan

Menurut Buku Pedoman Pelaksana PKH, penerima PKH mendapatkan bantuan PKH selama 6 (enam) tahun. Setelah itu akan dilakukan peninjauan kondisi sosial ekonomi oleh Kemensos RI melalui kegiatan resertifikasi yang seharusnya dilakukan setiap tahun kelima sebagai peserta PKH untuk menentukan penerima PKH mendapatkan kesempatan 3 (tiga) tahun lagi menerima bantuan PKH (transisi) atau layak

graduasi. Penerima PKH dengan status transisi akan diberikan peningkatan kapasitas dan berbagai program terkait sebagai persiapan graduasi sejahtera mandiri. Sayangnya, instrument resertifikasi tidak dilaksanakan sehingga masih banyak KPM PKH yang sudah lebih dari 9 (Sembilan) tahun masih menerima bantuan PKH. Hal ini didukung dengan hasil penelitian Puteri (2021) yang mengemukakan bahwa graduasi mandiri belum maksimal karena masih menyesuaikan dengan keadaan KPM.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut :

1. Setiap KPM PKH paska graduasi sejahtera mandiri yang menjadi informan dalam penelitian ini kehidupannya sejahtera. Hal ini dilihat berdasarkan kondisi ekonomi yaitu penghasilan bersih per bulan berada di atas umk lampung tengah. Pendapatan minimum setiap anggota rumah tangga KPM PKH paska graduasi sejahtera mandiri juga berada di atas batas garis kemiskinan Kabupaten Lampung Tengah
2. Beberapa faktor pendorong graduasi sejahtera mandiri di Kabupaten Lampung Tengah diantaranya, yaitu pola pikir, daya juang dan kemampuan mengelola keuangan keluarga, dukungan dari keluarga KPM PKH, peran koordinator kabupaten PKH, dukungan dari aparatur pemerintahan desa dan kecamatan setempat dan apresiasi dari Kementerian Sosial RI terhadap keberhasilan SDM PKH dalam hal graduasi Sejahtera mandiri, sedangkan faktor penghambat yaitu adanya perbedaan persepsi SDM PKH, sebagian besar *self efficacy* Pendamping Sosial PKH masih lemah, tidak ada dukungan dari aparatur kampung/kelurahan, penggunaan standar kriteria keluarga miskin kurang relevan dan Kabupaten Lampung Tengah tidak

melakukan pengesahan data graduasi sejahtera mandiri sehingga data tetap keluar sebagai penerima PKH.

SANWACANA

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada pendamping sosial PKH dan Dinas Sosial Kabupaten Lampung Tengah. Ucapan terima kasih dapat juga disampaikan kepada pihak-pihak yang membantu pelaksanaan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahmat, M. (1988). *Geografi Perilaku Suatu Pengantar Studi Tentang Persepsi Lingkungan*. Depdikbud. Jakarta.
- Aprilina, D., I. Nurmayasari dan K. K. Ranga. (2017). Keefektifan Komunikasi Kelompok Tani dalam Penerapan Program Jarwobangplus di Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu. *JIIA (Jurnal Ilmu-Ilmu Agribisnis)*, 5(2).
- Armalid, I. I., E. R. Purboningsih, T. R. Widiastuti dan R. H. Ninin. (2020). *Studi Eksplorasi : Analisis Faktor Pendorong Ibu dari Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Program Keluarga Harapan dalam Mencapai Graduasi Mandiri*. Fakultas Psikologi. Universitas Padjajaran. Bandung.
- Bandura. A. (1997). *Self Efficacy. The exercise of Control*. W. H. Froeman and Company. New York.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2020). *Indikator Kesejahteraan Rakyat 2020*. BPS RI.
- Handoko, Hani. T. (2007). *Manajemen Personalialia dan Sumber Daya Manusia*. BPF. Yogyakarta.
- Intan, E. M., S. Rahmawati dan M. G. Wibowo. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kawasan Barat Indonesia Pereode 2016-2020. *Jurnal Al- Iqtishad* : 18 (1), 65-83.
- Kementerian Sosial RI, (2020). *Petunjuk Teknis Graduasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan Tahun 2020*, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jamin Sosial, Direktorat Jaminan Sosial Keluarga. Jakarta.
- Kementerian Sosial RI, (2021). *Pedoman Umum Program Keluarga Harapan (PKH)*. Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Direktorat Jaminan Sosial Keluarga. Jakarta.
- Kusumaningrung, R., F. Nugroho dan Alfrojems. (2020). Faktor - Faktor Keberhasilan Keluarga Penerima Manfaat untuk Mencapai Graduasi dari Program Keluarga Harapan. *Jurnal PKS* : 19 (3), 265-275.
- Khoiriyah, N. dan Kunarti. (2019). Graduasi Mandiri : Bentuk Keberdayaan Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Pati. *Jurnal Pengentasan Masyarakat Islam* : 10 (2), 143 – 156. <https://journal.uinmataram.ac.id> Diakses pada tanggal 24 april 2020.
- Puteri, G.C. (2021). Pentingnya Penguatan Mekanisme dan Instrumen Resertifikas /Graduasi KPM PKH. *Jurnal Sosial Humaniora Terapan* : (2).
- Putri, S. A., S. Gitosaputro dan Y. A. Syarief. (2020). *Motivasi Petani Mengikuti Program Asuransi Usahatani Padi di Kabupaten Lampung Tengah*. *Suluh Pembangunan : Journal of Extension and Development*. 2 (1), 45-53.
- Setiawan. T. (2005). Pengaruh Motivasi dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Bank Mandiri Cabang Malang. *Tesis*. Universitas Brawijaya Malang.

Tanjung, R., K.K. Ranga., I. Listiana dan T. Hasanuddin, (2023). Persepsi Penyuluh Pertanian Lapangan Terhadap Program Komando Strategis Pembangunan Pertanian (Kostratani) di Kabupaten Lampung Timur. *Suluh Pembangunan: Journal of Extension and Development*. 5 (1)

Musoleha, T., T. Hasanuddin dan I. Listiana. (2014). Persepsi Masyarakat Terhadap Program Kemitraan dan Bina lingkungan (PKBL) PTPN VII Unit Usaha Rejosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. *Jurnal Ilmu - Ilmu Agribisnis : Journal of Agribusiness Science*, 2(4) : 390-398.